

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA (STUDI TENTANG UPAYA
PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU)**

By : Rereantina Gempita Ayudya
rereantina@gmail.com
Supervisor : Dr. Khairul Anwar. M.Si
Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Efforts to implement the curriculum in 2013 by the city of Pekanbaru in this case the city education office pekanbaru not running optimally, the implementation of the curriculum in 2013 in the city of Pekanbaru is not running optimally, then through a variable based on the theory of policy implementation by George Edwards III can be found basic formulation of the research problem how the efforts made by the city government in the implementation of the curriculum pekanbaru 2013 in the city of Pekanbaru.

Furthermore, the purpose of this study was to determine the curriculum implementation efforts in 2013 were carried out by the city of Pekanbaru. This study used a qualitative model with descriptive method, which is conducted by interview, documentation, and direct observation regarding the implementation of curriculum activities in 2013 in the city of Pekanbaru. In this research method used is an interactive data analysis (interactive models of analysis) of Miles and Huberman which includes data collection, data reduction, data display, and conclusion. The results of this study indicate that the implementation efforts made by the Government of Pekanbaru City concluded that the implementation of a curriculum efforts in 2013 were carried out by performing less well.

Keywords: effort, the implementation of policies, curriculum, 2013, the city of Pekanbaru

PENDAHULUAN

Berlandaskan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat terdapat amanat bagi pemerintah negara Indonesia yang salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kedalam sebuah bentuk penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,

peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan akan kebutuhan global. Sebagai salah satu elemen terhadap peningkatan mutu pendidikan, kurikulum harus terus menerus mengalami pembaharuan agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan.

Ketentuan atas pengembangan kurikulum diatur melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang didalam perubahannya terdapat tambahan Bab XI A tentang ketentuan yang mengatur tentang poin-poin pengembangan kurikulum. Sebagaimana substansi yang terkandung didalam poin-poin pengembangan kurikulum tersebut maka kebijakan ini menandai terjadinya perubahan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 yang sebelumnya dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di tiap satuan pendidikan menjadi kurikulum 2013.

Uji coba kurikulum dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum yang dimana mengamanatkan bahwa uji coba kurikulum dimulai dari bulan Juli tahun 2013. Sebanyak 36 sekolah tersebut melaksanakan uji coba kurikulum 2013 di kota Pekanbaru, untuk sekolah yang belum melaksanakannya pada bulan Juli Tahun Pelajaran 2014/2015 akan menerapkan kurikulum 2013 secara menyeluruh se-kota Pekanbaru. Persiapan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terkait pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu:

a. Untuk pendistribusian buku pelajaran di daerah terdapat Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dengan perannya sebagai pihak yang mendata jumlah penerima buku pelajaran di setiap sekolah yang ada di kota Pekanbaru. Pihak dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan menyatakan pihaknya mendapat laporan dari sekolah bahwa buku pelajaran kurikulum 2013 belum juga sampai ke satuan tingkat pendidikan tersebut. Alhasil uji coba

mengalami sedikit kendala di SD dan SMK tersebut karena buku pelajaran sebagai sarana penunjang kurikulum belum ada untuk dipergunakan oleh guru maupun murid.

- b. Terkait sosialisasi kurikulum 2013 kepada guru sebagai tenaga pendidik, Penyelenggara sosialisasi kurikulum 2013 yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi pemerintah hanya menyelenggarakan pelatihan guru pada tahap jelang uji coba kurikulum 2013 saja. Untuk pelaksanaan kurikulum 2013 secara menyeluruh merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelatihan guru ini sesuai dengan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, dimana yang salah satu poin kebijakan tersebut yakni mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan dukungan anggaran pelatihan guru sasaran kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI. Kenyataannya sampai saat ini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum menyelenggarakan pelatihan guru secara menyeluruh padahal pelaksanaan kurikulum 2013 ini akan dimulai dalam rentang waktu lebih kurang 3 (bulan) kedepan yakni pada bulan Juli Tahun Pelajaran 2014/2015.
- c. Idealnya buku pelajaran kurikulum 2013 sudah harus tersedia pada seluruh satuan pendidikan dalam hal ini yaitu sekolah dari mulai awal uji coba kurikulum sehingga semua guru bukan hanya guru yang sekolahnya menerapkan uji coba saja dapat mempelajari materi kurikulum tetapi semua guru di seluruh sekolah dapat memahami secara mendalam akan materi kurikulum 2013 ini sehingga kurikulum dapat dilaksanakan sesuai dengan substansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jauh dari kondisi ideal, berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Pengembangan Tingkat

TK/SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bahwa sampai saat ini sekolah belum mendapatkan buku pelajaran kurikulum 2013.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka rumusan masalah, pelaksanaan kurikulum 2013 di kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal, maka melalui variabel berdasarkan teori implementasi kebijakan oleh George Edwards III dapat ditemukan rumusan masalah penelitian, seperti:

1. Bagaimanakah komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di kota Pekanbaru ?
2. Apakah ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah memadai untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 2013 di kota Pekanbaru ?
3. Bagaimanakah kecenderungan tingkah laku pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan kurikulum 2013 di kota Pekanbaru ?
4. Bagaimanakah bentuk struktur birokrasi dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mempengaruhi pelaksanaan kurikulum 2013 di kota Pekanbaru ?

Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka peneliti memberi judul penelitian "*Kebijakan Pendidikan Di Indonesia (Studi Tentang Upaya Pelaksanaan Kurikulum 2013 Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru)*".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Penelitian penyajiannya secara deskriptif. Peneliti menggunakan konsep dan kerangka konseptual yang mana peneliti meninjau secara langsung objek penelitian,

mencari data dan memecahkan masalah yang sedang berlangsung atau dihadapi saat ini. Berdasarkan faktor yang tampak untuk kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab dan mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) provinsi Riau, serta sekolah-sekolah negeri pelaksana kurikulum 2013 di kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai beberapa informan penelitian yang dianggap mengetahui permasalahan ini, informan juga dimaksudkan sebagai suatu istilah yang memberikan pengertian kepada seseorang atau subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi yang ia ketahui.

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dengan melakukan kegiatan dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung di lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis data interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 DI KOTA PEKANBARU

A. Komunikasi

Komunikasi, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Teori implementasi kebijakan oleh George Edwards III ini membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

1. Transmisi

Agar pelaksanaan kurikulum 2013 di kota Pekanbaru berjalan dengan efektif maka komunikasi berupa pelatihan guru agar petunjuk-petunjuk mengenai substansi dari kurikulum 2013 tersampaikan dengan jelas kepada pelaksana kebijakan yakni guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui unit pelaksana teknis di daerah yaitu Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Riau telah melakukan pelatihan guru terhitung sejak awal mula uji coba kurikulum 2013 dengan menggunakan dana alokasi APBN. Pelatihan guru terus menerus dilaksanakan oleh LPMP Provinsi Riau sampai dengan pelaksanaan kurikulum 2013 secara menyeluruh di kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru setidaknya telah melakukan enam kali pelatihan guru kurikulum 2013 dengan sasaran peserta pelatihan yaitu seluruh guru yang mengajar di kota Pekanbaru selama tahun 2014.

2. Kejelasan

Penyampaian informasi berupa pelatihan kurikulum 2013 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kepada guru berdampak positif yaitu guru menjadi paham tentang kurikulum 2013. Tetapi dengan adanya tenaga pendidik yang belum memahami metode penilaian siswa menjadi bukti bahwa pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum optimal.

3. Konsistensi

Idealnya agar konsistensi komunikasi berjalan dengan baik hendaknya pelatihan kurikulum 2013 dilakukan lebih dari satu bulan didalam satu tahun. LPMP sebagai lembaga diluar pemerintah kota dalam mengadakan pelatihan kurikulum pihaknya melakukan

pelatihan selama enam bulan sepanjang tahun 2014 guna komunikasi berupa penyampaian informasi kebijakan kurikulum 2013 berjalan dengan baik. Di lain pihak, sebagai yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan di kota Pekanbaru berdasarkan sajian data tentang pelatihan kurikulum 2013 yang diadakan sepanjang tahun 2014, Dinas Pendidikan hanya melakukan kegiatan pelatihan kurikulum 2013 pada bulan September saja. Jadi, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum optimal melakukan upaya konsistensi komunikasi kebijakan bagi pelaksanaan kurikulum 2013 di kota Pekanbaru.

B. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, wewenang, dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pelaksanaan suatu kebijakan dalam hal ini pelaksanaan kurikulum 2013 di kota Pekanbaru.

1. Staf

Simpulan dari beberapa pernyataan para informan mengenai sumber daya berupa staf yakni dapat diketahui bahwa dalam upaya pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 telah memadai karena di setiap satuan pendidikan telah terdapat staf ahli dalam hal ini yaitu kepala seksi yang menangani langsung pelaksanaan kurikulum 2013 di setiap satuan pendidikan di kota Pekanbaru.

2. Informasi

Perihal penyampaian informasi didapat melalui surat edaran, media cetak maupun elektronik khususnya internet untuk mendapatkan informasi pelaksanaan

kurikulum 2013 dengan cepat. Melalui observasi yang dilakukan penulis melalui media elektronik yakni internet, selain melalui rapat koordinasi internal dinas pendidikan, informasi tentang teknis pelaksanaan kurikulum didapat oleh staf melalui media elektronik dengan mengakses situs *www.kemendikbud.go.id*.

3. Wewenang

Berdasarkan uraian data mengenai wewenang penulis memperoleh simpulan yakni wewenang yang dimiliki oleh pemerintah kota bersifat terbatas, terbatas dalam hal ini bahwa pemerintah kota hanya memiliki wewenang meneruskan kebijakan kurikulum 2013 yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Perihal Implementasi Kurikulum 2013.

4. Fasilitas-Fasilitas

pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 di kota Pekanbaru, setidaknya pemerintah kota dapat menyediakan fasilitas berupa bangunan sekolah yang layak, buku-buku pelajaran, perangkat multimedia, serta yang paling penting yakni tenaga pendidik atau guru agar pelaksanaan kurikulum 2013 di setiap satuan pendidikan berjalan dengan baik. sekolah-sekolah sampel penelitian lainnya yang kondisi kelengkapan buku pelajaran siswa dan dan buku guru belum memadai atau belum lengkap. Buku pelajaran terdiri dari buku siswa dan buku guru setiap tema pembelajaran, dengan tidak adanya kelengkapan ini menjadikan sedikit kendala dalam proses pembelajaran disekolah.

Idealnya sekolah wajib untuk menyediakan fasilitas multimedia beserta jaringan internet yang berguna bagi sumber informasi pengetahuan murid dalam proses pembelajaran. Tetapi

kenyataan yang didapat setelah dilakukan observasi langsung keenam sekolah sampel, hasilnya keseluruhan sekolah tidak memiliki fasilitas multimedia yang memadai bagi murid-muridnya.

Berdasarkan data tabel kebutuhan guru SMA Negeri di kota Pekanbaru terlihat bahwa terdapat kekurangan sebanyak 34 orang guru di beberapa mata pelajaran yang ada di SMA Negeri yang ada di kota Pekanbaru. Adanya kenyataan kekurangan guru ini dapat menyebabkan hambatan-hambatan didalam pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA negeri yang ada di kota Pekanbaru. Fasilitas berupa tenaga pendidik yakni guru idealnya harus terpenuhi jika kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

C. Tingkah Laku Pelaksana

1. Dampak Dari Kecenderungan Tingkah Laku Pelaksana

Terkait pelaksanaan kurikulum 2013 para informan yang dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggapan yang senada dengan mendukung ketetapan pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kesimpulan ini membenarkan teori Edwards III bahwa sifat badan-badan pemerintah yang memiliki perekrutan staf dengan latar belakang yang relatif sama memiliki kecenderungan tingkah laku yang sama pula.

2. Pengangkatan Staf

Perihal pengangkatan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dilakukan oleh perekrutan melalui tes calon pegawai negeri sipil yang memiliki klasifikasi khusus salah satunya adalah tamatan pendidikan seorang staf. Berdasarkan observasi penulis di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Kondisi riil dilapangan berbeda dari keadaan ideal

seperti yang dipaparkan sebelumnya. Staf-staf yang ada hanya mengerti masalah administrasi perkantoran saja tanpa kompetensi di bidang pendidikan. Pengangkatan dan penempatan pegawai tidak didasarkan khusus staf yang berkompeten di bidang pendidikan, sehingga sedikit staf-staf yang mengetahui mengenai prosedur-prosedur pelaksanaan kurikulum. Data primer berupa hasil wawancara mengenai pelaksanaan kurikulum 2013 hanya penulis dapatkan dari staf-staf ahli seperti kepala bidang pendidikan dan kepala seksi bidang pendidikan saja.

D. Struktur Birokrasi

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penulis dalam melakukan penelitian untuk memperoleh standar operasional prosedur Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tidak berhasil mendapatkan informasi mengenai standar operasional prosedur pelayanan secara umum. Mengenai teknik pelaksanaan pendampingan diatas dikatakan oleh Kepala Seksi SMA Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru didalam kutipan wawancaranya bahwa aturan pelaksanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagaimana bagan diatas telah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ada di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebelumnya.

2. Fragmentasi

Penyebaran tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terkait upaya pelaksanaan kurikulum 2013 yang dilaksanakan di kota Pekanbaru terdapat dua bidang yang bertanggung jawab menangani tugas pelaksanaan kurikulum 2013. Kedua bidang ini yakni Bidang Pendidikan Dasar dan Bidang Pendidikan Menengah, hal ini

berdasarkan rekomendasi informan penelitian yang diarahkan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kepada penulis didalam kegiatan penelitian di instansi pemerintahan tersebut. fragmentasi yang dilakukan dengan instruksi yang jelas dapat mendukung jalannya kebijakan, dan staf yang diberi tugas pun yakni masing-masing kepala seksi mengetahui dan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasannya dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pendidikan. Karena terdapat kejelasan mengenai tanggung jawab dan tugas pada setiap bidang-bidang yang ditangani. Kondisi ini maka pelaksana kebijakan lebih fokus menangani pelaksanaan sesuai dan tanpa melampaui tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards III yaitu komunikasi, kualitas dan kuantitas sumber daya, kecenderungan dari sikap pelaksana, serta dari struktur birokrasi organisasi itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan seperti pelatihan kurikulum 2013, pengadaan buku pelajaran, kegiatan *monitoring*, pendampingan implementasi kurikulum 2013 belum dilakukan secara efektif karena masih saja terdapat banyak kekurangan didalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kurikulum 2013 Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan panduan prosedur pelaksanaan dengan jumlah yang minim, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di kota Pekanbaru. Fasilitas-fasilitas penunjang pelaksanaan kurikulum 2013 seperti perangkat multimedia serta teknologi informatika belum dimiliki oleh sebagian

besar satuan pendidikan yang ada di kota pekanbaru.

Para pelaksana kebijakan sendiri mendukung penuh perihal pelaksanaan kurikulum 2013 di kota pekanbaru. Tetapi dukungan penuh serta tanggapan yang positif tidaklah berarti jikalau tidak didukung oleh fasilitas penunjang yang lengkap serta teknis pelaksanaan yang berjalan dengan benar yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Maka dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya melaksanakan kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kurang terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fattah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Lexy, J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nogi, Hasel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung& Co.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013*. 2013. Jakarta. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Panduan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar*. 2013. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang **Sistem Pendidikan Nasional**

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang **Standar Nasional Pendidikan**

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang **Standar Nasional Pendidikan**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang **Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota**

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang **Implementasi Kurikulum**

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang **Penyelenggaraan Pendidikan**

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
**Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru**

<http://faktapost.com>

<http://www.halloriau.com>

<http://m.tempo.co>

www.kemendikbud.go.id

www.riaudailyphoto.com

www.seriau.com

C. Skripsi

Agustina, Lisa. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintahan Bidang Kepariwisata di Kabupaten Natuna*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Islam Riau

Jefri. 2013. *Perencanaan Bottom Up Dalam Bidang Pendidikan Dasar Di Kabupaten Siak Tahun 2006-2011*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Riau.

Hidayat, Fitrah, Wan. 2013. *Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Pekanbaru Di Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2012*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Riau.

Maulana, Defri. 2013. *Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sebelum Dan Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Riau.

Wijaya, Kusuma, Fitra. 2013. *Analisis Implementasi Kebijakan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Riau.

D. Sumber Lainnya